

**UPAYA INDONESIA MENCAPAI TARGET *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
BIDANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN SEKAYAM KABUPATEN SANGGAU
KALIMANTAN BARAT (2014-2019)**

Adityo Darmawan Sudagung, Veronica Putri, Joy Evan, Ivan Sasiva, Laras Putri Olifiani,
Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Tanjungpura, Pontianak

Email: adityo.ds@fisip.untan.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan mengelaborasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia era Joko Widodo untuk mencapai pemenuhan target *Sustainable Development Goals* di bidang pendidikan, khususnya di Kecamatan Sekayam. Kondisi pendidikan yang belum merata di Indonesia meskipun secara kuantitas pencapaian *Millenium Development Goals* sudah memenuhi target. Kecamatan Sekayam sebagai daerah yang masuk di kawasan perbatasan menjadi rentan karena terdapat godaan-godaan untuk terus menikmati pelayanan sosial dan ekonomi dari negara tetangga. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang menggunakan analisis konsep pembangunan dalam studi Hubungan Internasional dan *human security*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa negara sudah berupaya hadir memenuhi kebutuhan masyarakat atas pendidikan. Dibuktikan dengan upaya pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan. Tetapi, faktor kordinasi lintas instansi masih menjadi momok yang perlu ditanggulangi. Kebutuhan akan kualitas SDM yang baik melalui pendidikan akan sangat bermanfaat bagi kualitas pembangunan Indonesia menuju Agenda SDGs 2030.

Kata kunci: SDGs, pendidikan, pembangunan berkelanjutan, *human security*

PENDAHULUAN

Penyempurnaan *Millenium Development Goals* (MDGs) menjadi *Sustainable Development Goals* (SDGs) mulai dilakukan pasca 2015. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang potensial di Asia Tenggara juga ikut menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Jika sebelumnya pencapaian MDGs Indonesia dapat dikatakan baik pada beberapa indikator. BPS mencatat setidaknya sekitar 70% indikator telah sukses dicapai Indonesia (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2016). Contohnya adalah proporsi orang dengan penghasilan per kapita di bawah 1 dolar per hari telah turun sekitar 15 persen menjadi 10,3 persen pada tahun 2016 (UNDP Indonesia, 2016, p. 8). Indikator pencapaian pendidikan dasar juga telah berhasil didapatkan pada tahun 2015 (UNDP Indonesia, 2016, p. 8). Ditunjukkan dengan peningkatan IPM yang juga terus meningkat. Namun, pada indikator lainnya seperti mengurangi malnutrisi, HIV/AIDS, dan kematian ibu melahirkan, peningkatan perlindungan kawasan hutan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang bersih (UNDP Indonesia, 2016, p. 8). Masalah lain yang juga menjadi perhatian bagi capaian MDGs Indonesia adalah ketidakmerataan dan jumlah angka kemiskinan.

Perluasan target pembangunan global juga perlu diikuti dengan peningkatan komitmen serta langkah nyata dari pemerintah Indonesia. Pemerintah mencantumkan beberapa isu dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Poin prioritas Pemerintah Indonesia dari tujuan pembangunan berkelanjutan global, antara lain adalah meningkatkan kesejahteraan sekaligus menurunkan ketidakmerataan dan memastikan pembangunan yang tidak merusak lingkungan (UNDP Indonesia, 2016, p. 8). Langkah lainnya yang dilakukan sampai dengan tahun 2016, antara lain adalah: (i) melakukan pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas pembangunan nasional, (ii) melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk indikator proksi, (iii) melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator SDGs, (iv) menyusun peraturan presiden terkait dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan (v) mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2016). Pemerintah juga membentuk Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Hal lain yang juga telah selaras dengan arah pembangunan nasional Indonesia adalah poin-poin dalam Nawa Cita dengan tujuan SDGs. Nawa Cita merupakan visi pemerintahan Jokowi-JK

dalam membangun Indonesia selama periode 5 tahun. Sebagai pendukung utama peningkatan kualitas sumber daya manusia, faktor pendidikan berkualitas menjadi hal yang wajib dicapai. Sejalan dengan itu, Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam visi Nawa Cita mencantumkan dua aspek yang sangat krusial dalam pembangunan sumber daya manusia. Pertama, visi ketiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kedua, visi kelima meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

Meskipun secara kuantitatif capaian MDGs Indonesia di bidang pendidikan sudah baik, tetapi fenomena ketidakmerataan masih menjadi tugas berat pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Kondisi di sana memang masih menyimpan beberapa permasalahan, seperti rendahnya kualitas pendidikan, akses pelayanan kesehatan, layan publik, ketersediaan barang kebutuhan, dan akses informasi yang terbatas. Bahkan kelima kabupaten yang ada di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia masuk dalam kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Begitu juga dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kawasan perbatasan. Kelima IPM kabupaten tersebut berturut-turut tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1 – IPM Kabupaten Kawasan Perbatasan di Kalimantan Barat

No	Nama Kabupaten	IPM
1	Kapuas Hulu	65,03
2	Sintang	66,07
3	Sanggau	65,15
4	Sambas	66,61
5	Bengkayang	66,85

Sumber: BPS Kalimantan Barat (2018)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat memperoleh angka sebesar 65,88 dan memperoleh peringkat ke-29 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini merupakan peringkat yang cukup mengecewakan. Karena jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur yang notabene sama-sama berada di wilayah Pulau Kalimantan, mereka dapat memperoleh angka 74,59 dan menempati peringkat ketiga provinsi di Indonesia dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi (BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2018, pp. 500-502).

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia disebabkan beberapa hal, namun jika kita melihat dari masalah yang dihadapi saat ini, pendidikanlah yang merupakan masalah utama. Fasilitas dan sara prasarana pendidikan di daerah-daerah di Kalimantan Barat yang memprihatinkan dan terkesan seadanya merupakan potensi yang dapat memperburuk angka partisipasi sekolah dan angka rata-rata lama belajar yang jika kita perhatikan dari data di atas, setiap tahunnya mengalami progres yang melambat. Kecilnya angka partisipasi sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang ditambah oleh kesadaran yang rendah dari masyarakat untuk menuntut ilmu, merupakan beberapa faktor yang dapat mengganggu lajunya IPM di Kalbar. Ketika seorang manusia sudah mengalami keadaan yang demikian, secara otomatis taraf hidup manusia tersebut akan jauh dari kata layak, karena tidak memiliki bekal apapun dalam hal ilmu pengetahuan. Hal ini menyebabkan seorang manusia tidak memiliki pengetahuan yang luas untuk mengarungi kehidupan. Semua permasalahan ini bermuara lagi kepada pendidikan yang layak agar kelak manusia memiliki keilmuan yang mengantarkannya pada taraf kehidupan yang lebih baik.

Ketimpangan juga cukup tinggi antara IPM kawasan perbatasan dengan ibu kota provinsi, Pontianak, yang sudah memiliki IPM sebesar 78,56. Peneliti sempat menelusuri sebuah artikel daring yang menunjukkan kebiasaan masyarakat di Kecamatan Badau dan Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyekolahkan anaknya di Malaysia (Ruslan, 2011). Syarat mereka dapat menyekolahkan anak-anak ke Malaysia adalah dengan memiliki akte kelahiran Malaysia. Dokumen ini dapat dengan mudah didapatkan jika selama proses kehamilan, ibu mereka selalu memeriksa kehamilan dan bersalin di rumah sakit Malaysia (Ruslan, 2011).

Adapun kebiasaan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal dan eksternal. Faktor internal yang disebutkan dalam artikel tersebut adalah oknum tenaga pendidikan di dua kecamatan tersebut lebih mementingkan bisnis pribadi ketimbang memajukan mutu

pendidikan (Ruslan, 2011). Para oknum dinilai kurang disiplin, malas mengajar, dan biasa membolos dengan berbagai macam alasan (Ruslan, 2011). Selain faktor internal yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat pula faktor eksternal yang mendorong masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Sarawak, Malaysia. Alasan biaya pendidikan, ketersediaan asrama, buku, makan, dan fasilitas pendukung lainnya tersedia di sana. Pemerintah Malaysia juga menyediakan tambahan insentif, seperti pengadaan laptop bagi setiap siswa (Ruslan, 2011). Menurut Ruslan (2011) kondisi ini berbeda dengan di Badau seperti penuturan Kepala SMA 1 Badau bahkan kalkulator sebagai fasilitas sekolah susah ditemukan. Faktor eksternal selanjutnya yang mendorong masyarakat memilih menyekolahkan anaknya di Malaysia adalah jaminan pekerjaan bagi sang anak. Pemerintah Malaysia menawarkan kewarganegaraan bagi anak berprestasi dan memfasilitasi mereka sampai bekerja jika bersedia menjadi warga Malaysia (Ruslan, 2011). Hal inilah salah satu cuplikan kasus yang menunjukkan ketimpangan pendidikan di perbatasan Kalbar dan Sarawak. Jika hal seperti ini dibiarkan bukan tidak mungkin akan banyak orang tua di perbatasan yang rela menjadikan anaknya sebagai warga negara Malaysia untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Kelima kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia tentu memiliki keunikan tersendiri, tetapi dalam tulisan ini peneliti hanya kan memfokuskan pada Kabupaten Sanggau. Hal itu didasari pada prioritas pembangunan kawasan perbatasan Jokowi-JK yang menempatkan Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau sebagai salah satu yang dikembangkan. Secara khusus peneliti meneliti Kecamatan Sekayam sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Entikong dan masih terdapat sekolah-sekolah yang kondisinya memprihatinkan dan juga memiliki jalur non-formal lintas batas ke Malaysia. Hal ini juga didasari oleh sebuah artikel pemberitaan yang viral di laman Antarafoto.com pada tanggal 27 Februari 2019. Laman tersebut memberitakan sejumlah 42 siswa kelas 3 dan 5 SDN 08 Bungkang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau duduk di lantai saat belajar di bekas rumah guru (Alfian, 2019).

Kondisi-kondisi keprihatinan yang memperlihatkan ketimpangan pembangunan bidang pendidikan Indonesia dalam kerangka MDGs dan SDGs patut mendapat perhatian lebih. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia era Joko Widodo untuk memenuhi target *Sustainable Development Goals* bidang pendidikan di Kecamatan Sekayam

Kabupaten Sanggau? Tulisan ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu (1) penjelasan teoritis tentang konsep pembangunan berkelanjutan dalam studi Hubungan Internasional, dan *human security* serta metode penelitian; (2) kondisi pendidikan di Kecamatan Sekayam; (3) upaya pemerintah Indonesia melakukan pembangunan pendidikan; dan (4) kesimpulan dari pembahasan dan analisis yang telah dilakukan.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

Kami akan mengawali uraian pada tinjauan pustaka dengan menjelaskan posisi kajian pembangunan dalam studi Hubungan Internasional. Setelahnya baru kami jelaskan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan. Kajian pembangunan sejatinya merupakan salah satu elemen dari tiap ilmu sosial, tapi kemudian mendapatkan tempat yang semakin penting dalam studi Hubungan Internasional melalui kebangkitan BRICs (Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok).

Fenomena tersebut menggeser realitas geopolitik dan praktek pembangunan dalam studi Hubungan Internasional (Hönke & Ledere, 2013, p. 776). Kemunculan mereka menjadi penanda kekuatan ekonomi baru pasca krisis ekonomi tahun 2008 hingga 2009, yang sebelumnya dipegang oleh Amerika Serikat dan Barat. Menurut Hönke & Ledere (2013, p. 776) penanda yang sangat signifikan lainnya adalah: (1) pendirian G-20 sebagai pengganti G-7/G-8 dalam forum pembicaraan geopolitik dan geoekonomi; (2) terhambatnya Putaran Doha 2009; (3) pengaturan kembali pembagian kuota bagi ekonomi berkembang dalam IMF dan Bank Dunia tahun 2010.

Pendekatan dalam kajian pembangunan dalam studi Hubungan Internasional dapat ditelusuri melalui pendekatan *statist* dan pembangunan manusia. Pendekatan *statist* menempatkan pentingnya negara melalui birokrasi dalam pembangunan (Hönke & Ledere, 2013, p. 782). Kasus-kasus seperti Jepang serta Asia Selatan dan Tenggara yang memiliki pemerintahan represif sukses menggenjot industrialisasi ekonomi. Rumus dalam menganalisa pembangunan yang ditawarkan adalah negara dapat dan harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penegakan hukum, pembangunan pendidikan atau pelayanan kesehatan (Hönke & Ledere, 2013, p. 782).

Selain pendekatan *statist*, pendekatan pembangunan manusia dapat membantu peneliti dalam mengelaborasi kasus SDG di bidang pendidikan yang terjadi di Indonesia. Fokus pembangunan selain dilakukan oleh aktor negara adalah menempatkan manusia/masyarakat sebagai objek atau sentral kebijakan pembangunan. Inti dari pendekatan ini lebih menekankan pada

kualitas pembangunan SDM, mulai dari memikirkan distribusi sumber daya, kualitas literasi, dan peningkatan partisipasi politik (Hönke & Ledere, 2013, p. 783). Hönke & Ledere (2013, p. 783) mengutip pendapat Sen yang menekankan pada pentingnya indikator *Human Development Index* (HDI, atau di Indonesia biasa dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)).

Lebih lanjut, konsep pembangunan berkelanjutan menempatkan isu yang menyesuaikan kebutuhan masa kini dengan juga mempersiapkan kebutuhan generasi yang akan datang (Emas, 2015). Penjelasan lebih elaboratif disampaikan oleh Albeit bahwa terdapat hubungan antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan (Emas, 2015). Arah kebijakan dari konsep pembangunan berkelanjutan adalah menjaga stabilitas jangka panjang yang menyelaraskan berbagai pendekatan pembangunan baik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Seperti yang dicantumkan dalam Deklarasi Rio bahwa setiap negara memiliki peranan dalam isu pembangunan berkelanjutan, yang diperjelas dengan pembagian klasifikasi negara maju dan berkembang (Emas, 2015). Melalui pendekatan ini, kami menilai bahwa dalam perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan, pemerintah harus memperhatikan setidaknya tiga aspek, lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Seiring dengan perkembangan konsep dan fenomena pembangunan berkelanjutan, integrasi antara aspek-aspek tersebut tampak semakin mengemuka. Momentum peluncuran *Human Development Report* pertama tahun 1990 dan penerapan Millennium Declaration tahun 2000, dan dibarengi dengan kolaborasi pencapaian target-target MDGs menjadi penandanya (United Nations, 2018). Beberapa serial kejadian ini menjadi pembuka semakin integratifnya pembangunan sosial yang berupaya memenuhi kebutuhan dasar manusia, mulai dari kesehatan hingga pendidikan. Begitu juga dengan peningkatan kolaborasi melalui *2030 Agenda for Sustainable Development* memberikan ruang bagi isu-isu lain untuk diintegrasikan dalam pembuatan kebijakan negara.

Pada tulisan ini, kami hanya akan memfokuskan pada dua aspek saja. Aspek ekonomi dan sosial kami anggap yang paling relevan dalam menjelaskan kasus kondisi pendidikan di Kecamatan Sekayam dalam kerangka SDGs. Serta akan menggunakan pendekatan *statist* dan pembangunan manusia sebagai alat analisis dalam melihat fokus kebijakan pembangunan pendidikan Indonesia, khususnya di Kecamatan Sekayam.

HUMAN SECURITY

Berdasarkan pada konsep *human security* UNDP 1994 disebutkan beberapa konsep dasar, yaitu pendekatan yang *universal*, pencegahan, dan *people-centred* yang memfokuskan pada kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari keinginan (Alkrie, 2003, p. 5). Masih menurut UNDP pada tahun 1994 disebutkan setidaknya dua konsep keamanan utama yang dapat mendefinisikan *human security*, yaitu (1) *Safety from chronic threats such as hunger, disease and repression* dan (2) *Protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life – whether in jobs, in homes or in communities* (Alkrie, 2003, p. 14). Alkrie (2003, p. 8) sendiri mendefinisikan *human security* sebagai “*The objective of human security is to safeguard the vital core of all human lives from critical pervasive threats, without impeding long-term human fulfilment.*”

Dalam pernyataan tersebut setidaknya Alkrie menjelaskan terdapat beberapa kata kunci yang terkandung dalam *human security*, yaitu *safeguard*, *vital core*, *all-human lives*, *critical pervasive threats*, dan *long-term human fulfilment*. Kata kunci *safeguard* setidaknya memiliki dua penjelasan, yaitu melalui penyediaan dan promosi *human security* dan menghargai *human security*. Penyediaan dan promosi dapat dilakukan melalui identifikasi ancaman kritis yang tersebar, pencegahan sehingga resiko tidak terjadi, mitigasi sehingga jika resiko terjadi dampak yang terjadi lebih terbatas, respon sehingga korban-korban atau si miskin dapat bertahan dengan tegar dan mempertahankan kehidupan mereka.

Kehilangan akan kebutuhan *human security* dapat terjadi dalam proses yang lambat atau hening, atau dapat juga terjadi mendadak. Hal ini dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu pilihan kebijakan yang salah, terjadi akibat kejadian alami, atau dapat juga merupakan kombinasi dari keduanya, seperti pada contoh degradasi lingkungan yang mengarah pada bencana alam yang diikuti tragedi manusia (United Nations Development Programme, 1994, p. 23). Dalam hal ini kasus yang dibahas adalah terkait dengan kondisi pendidikan masyarakat Kecamatan Sekayam. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan keamanan masyarakat tersebut, dapat peneliti sampaikan beberapa ancaman terhadap *human security*. Hal ini disebutkan dalam *Human Development Report 1994* setidaknya ancaman tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut (United Nations Development Programme, 1994, p. 25) :

1. Keamanan ekonomi.
2. Keamanan makanan.

3. Keamanan kesehatan.
4. Keamanan lingkungan.
5. Keamanan pribadi.
6. Keamanan komunitas.
7. Keamanan politik.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada pembahasan ancaman atas keamanan ekonomi, komunitas, dan pribadi. Keterkaitan antara negara dan *human security* adalah walaupun terkadang menjadi sumber kekerasan, negara juga memiliki beberapa peranan, di antaranya *human security* tidak dapat dihindari dan tidak dapat dipisahkan bahwa ia adalah tentang negara dan lebih spesifik adalah mengenai hubungan antar masyarakat, dan antar masyarakat dan negara (Krause, 2007, pp. 6-7). Keith Krause (2007, p. 8) menjelaskan bahwa “*one function of the state is to provide for the security of its citizens*”. Hal ini mengindikasikan meskipun terdapat pergeseran isu objek keamanan yang dirasakan oleh masyarakat di suatu negara, tetap saja peran negara diperlukan untuk menyediakan rasa aman tersebut terhadap masyarakatnya.

Konsep ini akan peneliti akan menggunakannya untuk menjelaskan posisi penting pendidikan bagi kebutuhan masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia. Serta menggunakan konsep ini untuk menyampaikan peran negara dalam memenuhi kebutuhan keamanan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian memfokuskan analisis pada capaian yang dilakukan oleh Indonesia dalam memenuhi target indikator *Sustainable Development Goals* bidang pendidikan di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Limitasi waktu penelitian ditentukan hanya pada satu masa kepemimpinan Joko Widodo, yaitu 2014-2019. Penelusuran data dilakukan dengan melakukan studi dokumentasi dan observasi lapangan. Proses triangulasi dilaksanakan dengan membandingkan data yang didapatkan dari hasil observasi dan dokumen-dokumen berbeda, baik artikel jurnal, terbitan pemerintah, e-book, dan sebagainya. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisa strategi dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi indikator bidang pendidikan *Sustainable Development Goals*, khususnya di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.

KONDISI PENDIDIKAN DI KECAMATAN SEKAYAM

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan fasilitasi pendidikan yang menunjang tumbuhnya minat belajar para siswa. Keberadaan dan kelengkapan fasilitas yang tersedia di sekolah memiliki pengaruh yang besar terhadap pengembangan pendidikan. Fasilitas menjadi faktor penentu bangkitnya potensi para siswa dan pastinya mempermudah para guru dalam proses belajar mengajar dan pemberian materi kepada siswa. Fasilitas pendidikan ini tidak hanya mengenai benda-benda berwujud fisik saja, ketercukupan guru di sekolah dan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah merupakan beberapa bentuk fasilitas non-fisik, namun berdampak besar bagi pengembangan pendidikan saat ini.

Pada tahun 2015, hasil rilisan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau pada bidang pendidikan, untuk Kecamatan Sekayam sendiri diperoleh data rasio guru dan murid pada jenjang pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas/ sederajat. Berdasarkan data yang diperoleh, pada jenjang pendidikan dasar, tercatat jumlah guru sebanyak 291 dan jumlah murid sebanyak 4.907 siswa (BPS Kabupaten Sanggau, 2016, p. 5). Hal ini mengindikasikan bahwa seorang guru di sekolah dasar di Kecamatan Sekayam menanggung pengawasan sekitar 17 orang siswa. Pada tingkat sekolah menengah pertama/ sederajat, terdapat 1.774 siswa dan 133 guru, sehingga seorang guru sekolah menengah pertama di Kecamatan Sekayam menanggung pengawasan terhadap 13 orang murid di sekolah (BPS Kabupaten Sanggau, 2016, p. 5). Lalu untuk jenjang sekolah menengah atas/ sederajat, tercatat ada 92 guru dan 1.430 siswa, sehingga angka rasionya sekitar 16 orang siswa (BPS Kabupaten Sanggau, 2016, p. 5).

Untuk skala Kabupaten Sanggau sendiri, pada tahun 2017 data rasio antara guru dengan muridnya juga memiliki angka yang relatif hampir sama, yakni pada rasio 13-19 siswa per guru (BPS Kabupaten Sanggau, 2018, p. 6). Pada tingkatan sekolah dasar sendiri, data rasionya menunjukkan angka sekitat angka 15. Ini berarti setiap guru sekolah dasar di Sanggau memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap 15 orang murid. Sementara pada tingkat menengah pertama/ sederajat, rasionya menyentuh angka 16 orang, berarti seorang guru sekolah menengah pertama di Sanggau mengawasi sekitar 16 orang murid (BPS Kabupaten Sanggau, 2018, p. 6). Lalu pada tahap menengah atas/ sederajat, rasio guru dan muridnya menyentuh angka 19, yang

berarti seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengawasi 19 orang siswa (BPS Kabupaten Sanggau, 2018, p. 6).

Jika dilihat dengan seksama, data statistik rasio guru dan murid di Kecamatan Sekayam dan Kabupaten Sanggau memiliki angka yang relatif sama. Jika mengacu pada PP No 74 Tahun 2008, standar ideal rasio Murid : Guru adalah 20 : 1 (BPS Kabupaten Sanggau, 2018, p. 6). Jika kita melihat dari rasio murid dan guru dari beberapa jenjang pendidikan, baik di tingkat Kecamatan Sekayam maupun di Kabupaten Sanggau sendiri masih memenuhi standar ideal rasio murid dan guru. Angka rasionya tidak ada yang sampai menyentuh angka 20. Namun pada jenjang sekolah menengah atas di Kabupaten Sanggau tenaga pengajarnya harus lebih ditingkatkan lagi. Karena angka rasionya sudah berada pada tahap riskan yang hampir mendekati angka 20.

Fasilitas-fasilitas pendidikan juga dapat menjadi faktor minat seseorang dalam menempuh pendidikan. Di Kabupaten Sanggau, pada tahun 2017 sendiri memiliki data angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolahnya. Pada tahun 2017, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Sanggau tercatat sejumlah 11,53 tahun, dan angka rata-rata lama sekolahnya pada tahun yang sama sejumlah 6,93 tahun (BPS Kabupaten Sanggau, 2018, p. 6). Hal ini merupakan fakta yang ironis, karena angka rata-rata lama sekolahnya sangat jauh bahkan tidak sampai mendekati angka harapan yang telah direncanakan. Kebutuhan akan pendidikan menjadi sangat penting bagi masyarakat di Kecamatan Sekayam dan Kabupaten Sanggau.

Selama tiga tahun terakhir hingga tahun 2017, Pemerintah menargetkan angka yang semakin tinggi tiap tahunnya yang dimaksudkan agar angka lama pendidikan di Kabupaten Sanggau bisa ikut meningkat. Namun, yang diharapkan tidak sesuai dengan realitanya, bahkan peningkatan malah cenderung lambat, di mana angka kenaikannya hanya 0,19 tahun per-tiga tahun terakhir (BPS Kabupaten Sanggau, 2018, p. 6). Hal ini perlu dijadikan perhatian yang serius bagi Pemerintah untuk terus memfasilitasi sektor pendidikan agar pengembangan pendidikan bagi masyarakat dapat berjalan dengan baik dan efisien. Penyebaran guru dan sekolah yang belum merata, serta ketersediaan akses pendidikan yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan rendahnya angka lama sekolah mengalami perkembangan yang melambat bahkan dikhawatirkan akan menurun, sehingga kualitas keilmuan masyarakat di daerah tersebut juga mengalami perlambatan.

Sekolah merupakan instansi formal dan upaya bagi seseorang dalam menggapai ilmu setinggi-tingginya. Partisipasi seseorang dalam menggapai ilmu di sekolah dapat menentukan taraf pengembangan pendidikan suatu daerah. Untuk di Kecamatan Sekayam sendiri, data mengenai angka partisipasi sekolahnya hingga saat masih belum dapat diketahui, namun di Kabupaten Sanggau angka partisipasi sekolahnya memiliki angka yang cukup tinggi di setiap jenjangnya. Menurut data statistik pada tahun 2017, angka partisipasi sekolah pada tahapan umur 7-12 tahun (SD/ sederajat) cukup tinggi, yakni menyentuh angka 98,44 % (BPS Kabupaten Sanggau, 2018, p. 6). Sementara pada tahun yang sama, pada tahapan umur 13-15 tahun (SMP/ sederajat) memiliki angka yang relatif tinggi pula, yakni di angka 89,83 %. Sedangkan pada tahapan umur 16-18 tahun (SMA/ sederajat) masih di angka 59,46 % saja (BPS Kabupaten Sanggau, 2018, p. 6).

Untuk skala yang lebih luas lagi, menurut BPS Kalimantan Barat (2018, p. 9), angka partisipasi sekolah di Kalimantan Barat cukup tinggi. Pada tingkatan umur 7-12 tahun (SD/ sederajat) memiliki prosentase sebesar 98,44 %. Lalu untuk jenjang umur 13-15 tahun (SMP/ sederajat) diperoleh prosentase sebesar 92,51 %. Dan untuk tahapan umur 16-18 tahun (SMA/ sederajat) prosentasenya mencapai 67,53 %.

Setelah mengamati dengan seksama, angka partisipasi pendidikan antara Kabupaten Sanggau dengan skala Provinsi Kalimantan Barat memiliki prosentasi yang tidak berbeda jauh pada setiap jenjangnya. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya pendidikan di Kabupaten Sanggau dalam segi partisipasi sekolahnya memiliki angka rata-rata yang hampir setara dengan angka partisipasi sekolah di tingkat Provinsi. Dengan demikian, data bahwa Kabupaten Sanggau memiliki prosentase 59,46 % pada tahapan usia 16-18 tahun merupakan langkah yang cukup bagus, ini berarti lebih dari separuh penduduk Kabupaten Sanggau telah menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas.

Perbedaan gender seharusnya juga tidak mempengaruhi tingkat pendidikan. Namun, data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 mengatakan bahwa, hanya sekitar 50 persen dari penduduk perempuan berumur 16-18 tahun di Kabupaten Sanggau yang bersekolah di tahun 2017 (BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2018, p. 9). Isu *gender* yang berkaitan dengan pendidikan merupakan isu yang sudah lama terjadi di masyarakat. *Mindset* wanita hanya merupakan seorang ibu rumah tangga dan tidak perlu sekolah tinggi merupakan pola pikir yang harus dirubah sejak saat ini, terutama di daerah pedesaan dan kampung. Karena pola pikir seperti inilah yang aka menghambat

taraf pengembangan pendidikan mengalami progres yang lambat dan siklus yang cenderung menyempit. Pemerintah harus memiliki kepedulian ekstra dengan pola pikir warga masyarakatnya yang masih demikian, demi terwujudnya kualitas pendidikan dan keilmuan di daerah. Kualitas pendidikan di daerah, khususnya Kalimantan Barat, ditentukan oleh peranan dari seluruh masyarakatnya sendiri.

Dari data yang telah diambil oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 mengenai data jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Sanggau, diperoleh data sekolah dari jenjang Sekolah Dasar sampai tingkat Sekolah Menengah Atas dan sederajat sejumlah 656 sekolah. Sementara untuk Kecamatan Sekayam sendiri, jumlah sekolah dari tingkat SD hingga tingkat SMA sederajat sejumlah 46 sekolah. Jika dibandingkan dengan total jumlah sekolah di seluruh Kabupaten Sanggau dengan 15 Kecamatan, maka jumlah sekolah di Kecamatan Sekayam sudah cukup untuk mewakili jumlah rata-rata sekolah di 15 Kecamatan di Kabupaten Sanggau (BPS Kabupaten Sanggau, 2018, pp. 87-94).

Ini berarti bahwa untuk daerah perbatasan seperti Kecamatan Sekayam, jumlah dari institusi pendidikannya sendiri sudah mencukupi. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, terdapat sekolah yang belum memiliki fasilitas yang layak jika digunakan sebagai lingkungan para siswa untuk belajar. Salah satunya adalah SD Negeri 08 Bungkok. Untuk akses lokasinya sendiri, SD Negeri 08 Bungkok tergolong mudah untuk dijangkau, karena letaknya berada di tepi jalan raya dan bersebelahan dengan Kantor Desa Bungkok. Namun yang perlu diperhatikan dan ditinjau kembali adalah kondisi lingkungan sekitar sekolah dan fasilitas umum yang ada di sekolah tersebut. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, fasilitas-fasilitas umum yang ada di lingkungan sekolah memiliki kondisi yang memprihatinkan di mana ruang kelas yang jumlahnya tidak sebanding dengan rombongan belajar yang ada di sekolah tersebut. Belum lagi jika melihat kondisi di dalam ruang kelas yang sangat sederhana dengan satu papan tulis kayu, bangku siswa yang masih dalam bentuk memanjang, serta bangunan yang hampir seluruhnya masih menggunakan kayu.

Lingkungan sekitar sekolah juga menjadi indikator yang perlu diperhatikan. Karena walaupun terletak di tepi jalan raya desa dan bersebelahan dengan Kantor Desa Bungkok, namun letak sekolah yang terlalu dekat dengan lingkungan perumahan warga ternyata juga menjadi masalah tersendiri dalam proses belajar mengajar. Tak jarang hewan-hewan peliharaan warga

seperti anjing dan babi yang dilepasliarkan banyak berkeliaran di sekitar area sekolah. Hal ini merupakan masalah tersendiri, karena lingkungan belajar para murid telah dimasuki oleh hal-hal yang dapat mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar. Bahkan pada suatu kesempatan ditemukan bahwa hewan peliharaan sampai memasuki ruang kelas tempat siswa belajar. Untuk memulai pelajaran kembali, baik guru maupun murid harus mengusir terlebih dahulu hewan peliharaan warga yang memasuki ruang kelas tersebut. Hal ini tentunya mengurangi kondusifitas belajar para murid di kelas. Namun, dari data yang diperoleh di lapangan, anak-anak dari SD Negeri 08 Bungkang ternyata juga memiliki prestasi non-akademik yang cukup bagus. Datanya sebagai berikut:

Gambar 1 – Prestasi Siswa SDN 08 Bungkang

PRESTASI ANAK-ANAK SDN 08 BUNGKANG
DARI TAHUN 2005 / 2017

NO	CABANG OLAHRAGA	PERINGKAT	TAHUN	KETERANGAN
1	Tarik Tambang	I	2005	Acara Natal SEKAMI
2	Atletik	III	2009	PORSENI/O2SN
3	Catur Putri	III	2009	PORSENI/O2SN
4	Sepak Takraw	I	2011	PORSENI/O2SN
5	Sepak Bola	II	2011	PORSENI/O2SN
6	Sepak Bola	II	2012	PORSENI/O2SN
7	Sepak Takraw	II	2012	PORSENI/O2SN
8	Renang	II	2012	PORSENI/O2SN
9	Catur Putri	I	2014	PORSENI/O2SN
10	Atletik Putri	II	2014	PORSENI/O2SN
11	Renang Putra	III	2014	PORSENI/O2SN
12	Sepak Takraw	I	2015	PORSENI/O2SN
13	Catur Putri	II	2015	PORSENI/O2SN
14	Baca Kitab Suci	III	2015	Bulan Kitab Suci
15	Atletik Putra	I	2017	PORSENI/O2SN

Bungkang, 7 Agustus 2019
Kepala Sekolah

MARINUS, S. Pd. SD.
NIP. 19751226 1998071001

Sumber: Dokumentasi lapangan peneliti, 2019

Dari data di atas kita dapat melihat bahwa siswa-siswa di SD Negeri 08 Bungkang tetap dapat berprestasi meskipun fasilitas yang dimiliki sekolahnya kurang memadai. Namun kita dapat melihat bahwa pembinaan yang baik dari guru-guru yang terlatih pada bidangnya ternyata dapat membangkitkan potensi siswa, sehingga bisa menjuarai beberapa lomba tersebut. Pemerintah

sebagai pembuat kebijakan tertinggi seharusnya dapat membantu dalam perwujudan prestasi-prestasi non-akademik seperti ini disekolah-sekolah, sehingga dengan dibantu dukungan dan bimbingan dari para guru yang ahli dalam bidangnya, bukan tidak mungkin bila ditengah keterbatasan yang dialami, siswa masih dapat berprestasi dan mengharumkan nama sekolahnya.

Menengok dari fenomena di atas, telah tercukupinya jumlah sekolah merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pengembangan pendidikan. Namun ironisnya meskipun kebutuhan bangunan sekolahnya sudah tercukupi, akan tetapi fasilitas pendukung di dalamnya dan lingkungan sekitar tempat siswa menuntut ilmu belum terbina dengan baik. Seperti contoh SD Negeri 08 Bungkang yang meskipun letak sekolahnya cukup strategis, namun fasilitas sekolah dan keadaan lingkungan sekitarnya berbanding terbalik. Untuk mencapai taraf pengembangan pendidikan yang baik, diperlukan inisiatif dan dukungan dari masyarakat sekitar agar selaras bagi pengembangan pendidikan tersebut.

INDONESIA DAN POIN 4 SDGS SAMPAI TAHUN 2019

Berakhirnya *Millennium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015 masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah yang harus dibenahi terutama di sektor pendidikan. Adapun program yang dibuat sebagai penyempurnaan dari MDGs adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang melibatkan lebih banyak negara baik itu negara maju maupun berkembang dan mempunyai lebih banyak isu yang harus diselesaikan bersama demi pembangunan berkelanjutan untuk menjamin hak asasi manusia, menjaga kualitas lingkungan untuk kualitas hidup yang lebih baik dari generasi ke generasi. Singkatnya, SDGs adalah pembangunan yang dijadikan komitmen global sekaligus nasional.

Sebagai salah satu negara yang menerapkan SDGs, Indonesia berkomitmen untuk menyukseskan SDGs melalui beberapa langkah-langkah strategis. Keterlibatan negara dalam pembangunan bidang pendidikan menunjukkan implementasi pendekatan *statist* yang sudah dipaparkan sebelumnya. Keterlibatan pemerintah diawali dengan menempatkan SDGs sebagai arah tujuan pembangunan nasional. Sejumlah langkah yang telah ditempuh Indonesia sampai dengan akhir 2016 antara lain (i) melakukan pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas pembangunan nasional, (ii) melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk indikator proksi, (iii) melakukan penyusunan definisi

operasional untuk setiap indikator SDGs, (iv) menyusun peraturan presiden terkait dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan (v) mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2019).

Dari ketujuh belas poin SDGs, salah satu yang menjadi *concern* adalah poin 4, yaitu pembangunan yang bertujuan untuk memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang (Komnasham, 2017, p. 1). Pendidikan menjadi aspek yang patut untuk diprioritaskan karena kualitas sebuah bangsa dapat terlihat dari seberapa baik kualitas pendidikan dari bangsa itu sendiri. Kualitas pendidikan yang baik akan menciptakan masyarakat yang terpelajar dan terdidik. Hal ini akan berpengaruh pula pada keberlangsungan pembangunan di suatu negara.

Pentingnya aspek pendidikan menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terdapat beberapa poin yang menekankan kepada pentingnya membangun aspek pendidikan yang baik. Hal ini tercantum dalam Tujuan Global No. IV yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.¹ Tujuan Global tersebut terbagi lagi menjadi dua bentuk sasaran global yaitu :

a. Sasaran Global Pertama. Pada tahun 2030, Pemerintah Indonesia menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki harus menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.² Tercantum pula 7 poin **Sasaran Nasional RPJM 2015-2019**, diantaranya³:

1. Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).
2. Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%)

¹ PERPRES Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017, *Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, hlm. 25

² *ibid*

³ *Ibid*, hlm 26

3. Meningkatnya persentase SMA/MA berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,6% (2015:73,5%)
4. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).
5. Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).
6. Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 76,4%).
7. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).

Adapun instansi yang menjadi eksekutor dari semua poin dari sasaran global di atas antara lain: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kementerian Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.⁴

- b. Sasaran Global Kedua.** Pada tahun 2030, Pemerintah Indonesia menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.⁵ Yang didalamnya terdapat satu poin sasaran nasional RPJM, yaitu: meningkatkan APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).⁶ Adapun instansi yang menjadi eksekutor dari sasaran global diatas antara lain mencakup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.⁷

⁴ *ibid*

⁵ *ibid*, hlm 26

⁶ *ibid*

⁷ *ibid*

Kedua sasaran global tersebut beserta instansi yang terlibat di dalamnya menunjukkan penegasan bahwa negara memainkan peranan yang sangat besar. Di samping itu, fokus pembangunan manusia yang ditekankan sangat sesuai dengan arah pembangunan global bidang pendidikan tersebut. Di era Jokowi-JK memang menekankan pada gerakan revolusi mental yang menempatkan kualitas SDM sebagai salah satu hal yang diprioritaskan. Bahkan untuk mendorong hal tersebut dapat tercapai, pemerintahan mereka mengadakan sebuah kementerian kordinator baru, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sebagai bentuk kordinasi yang bertujuan menyamakan persepsi akan pencapaian SDGs, pemerintah pusat melakukan sosialisasi kepada instansi pusat dan pemerintah provinsi pada tahun 2017. Untuk di Kabupaten Sanggau sendiri kegiatan sosialisasi juga dimaksudkan untuk mendorong diterbitkannya dokumen Rencana Aksi Daerah dalam waktu satu tahun setelah diterbitkannya Perpres No. 59 Tahun 2017. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah pada umumnya adalah penyempurnaan dan sinkronisasi data (Bappeda Sanggau, 2017).

Selain itu, Pemerintah juga membentuk Sekretariat Nasional SDGs yang bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan mengenai SDGs di Indonesia dan menjamin implementasi SDGs berjalan dengan baik. Pihak-pihak yang dilibatkan untuk proses persiapan pelaksanaan SDGs di Indonesia terdiri dari kementerian, BPS, akademisi, pakar, organisasi masyarakat sipil dan filantropi & bisnis (Badan Pusat Statistik, 2019).

Dalam implementasinya, Indonesia mengadopsi beberapa prinsip yang telah disepakati yakni prinsip *universality*. Prinsip ini mengisyaratkan penerapan SDGs di semua negara tanpa terkecuali. Di Indonesia sendiri, penerapan SDGs akan diterapkan sebagai bagian dari pembangunan nasional yang artinya akan diimplementasikan diseluruh wilayah Indonesia. Prinsip kedua adalah *integration*, yang berarti penerapan SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dengan seluruh aspek termasuk didalamnya aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Terakhir adalah prinsip *No One Left Behind*, yang mengandung makna bahwa penerapan SDGs harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dan pelaksanaannya harus melibatkan semua pihak (Badan Pusat Statistik, 2019).

Bukti dari komitmen Indonesia dapat dilihat dari kesesuaian antara SDGs dan Prioritas Pembangunan Nasional jangka menengah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Terhitung sekitar 57% dari target SDGs telah selaras dengan

prioritas pembangunan nasional dan sebanyak 47 target telah sesuai dengan RPJMN. Berikut tabel prioritas nasional antara SDGs dan Target RPJMN yang sesuai dengan target SDGs.

Tabel 2 Kesesuaian SDGS dan Taget RPJMN

Pilar/Goal	Target Global	Target RPJMN 2015-2019	Beberapa Prioritas Nasional
Sosial (1,2,3,4,5)	47	27	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 3. Peningkatan Kedaulatan Pangan 4. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dan Indonesi Sehat 5. Melindungi Anak, Perempuan dan Kelompok Marjinal
Ekonomi (7,8,9,10,17)	54	30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedaulatan Energi 2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional 3. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja 4. Membangun Konektivitas Nasional 5. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah 6. Pelaksanaan Politik LN Bebas Aktif
Lingkungan (6,11,12,13,14,15)	56	31	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketahanan Air 2. Membangun Perumahan dan Kawasan Pemukiman 3. Penanganan Perubahan Iklim dan Penyediaan Informasi Iklim dan Kebencanaan 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan 5. Pelestarian SDA, LH dan Pengelolaan Bencana

			6. Rencana Aksi dan Strategi Keanekaragaman Hayati Indonesia
Hukum dan Tata Kelola (16)	12	8	1. Meningkatkan Kualitas Perlindungan WNI 2. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan 3. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sumber: BPS (2019)

Program Nasional Nawacita di era kepemimpinan Jokowi juga turut selaras dengan 17 tujuan/goal di SDGs. Nawacita yang terdiri dari 9 agenda pembangunan negeri akan mendukung penerapan SDGs di Indonesia sehingga target pencapaian tujuan SDGs lebih besar. Pada tabel 1.2 agenda Nawacita terlihat akan mendorong pencapaian tujuan SDGs melalui program-program yang tersebar.

Tabel 3 - Kesesuaian Antara Agenda Nawacita dan SDGS

Agenda Nasional (Nawacita)	SDGs
Nawacita 1 Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara	Goal 3,10,16,17
Nawacita 2 Membuat Pemerintah Selalu Hadir dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya	Goal 16
Nawacita 3 Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Negara Kesatuan	Goal 1-11
Nawacita 4 Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	Goal 14-26
Nawacita 5	Goal 1-6

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia	
Nawacita 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	<i>Goal 1-10</i>
Nawacita 7 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik	<i>Goal 1-5, 8, 9, dan 12-15</i>
Nawacita 8 Melakukan Revolusi Karakter Bangsa	<i>Goal 3-4, dan 11</i>
Nawacita 9 Memperteguh Ke-Bhineka-an dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia	<i>Goal 5, 10, 16, 17</i>

Sumber: BPS (2019)

UPAYA PEMERINTAH DAERAH MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Dalam upaya meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan penduduknya, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah dengan membangun sarana dan fasilitas pendidikan di setiap jenjang. Salah satu program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah tersedianya dan terjangkauunya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pada tahapan pendidikan menengah. Program wajib belajar mengharuskan penduduk pada tahapan usia 6-17 tahun untuk mengikuti pendidikan formal SD hingga SMP/SLTP/ sederajat. Bahkan dalam rangka mendorong keberhasilan program tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 20% dari total seluruh APBN negara untuk pencapaian tingkat kemajuan pengembangan dan pembangunan bidang pendidikan. Pencapaian tingkat kemajuannya sendiri salah satunya dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) (BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2018, p. 9). Setelah melihat Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari SD hingga jenjang SMP/ sederajat di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau yang memperoleh prosentase tinggi, sepertinya implementasi program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalami progres

yang positif hingga ke tingkat daerah. Ini merupakan capaian yang bagus dan perlu untuk lebih ditingkatkan lagi kinerjanya.

Dalam mewujudkan tercapainya SDGs (*Sustainable Development Goals*) poin 4 yang bertujuan untuk memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang, Pemkab Sanggau memiliki berbagai arah kebijakan dan strategi pembangunan di daerahnya. Sejalan dengan visi nya demi “Sanggau maju dan Terdepan”.

Dalam aspek pendidikan, sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019, (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sanggau memiliki misi yaitu “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial” (Badan Pembangunan Daerah Kab. Sanggau, 2014). Dari data RPJMD tersebut pula, terdapat beberapa *progress* dari Kabupaten Sanggau yang berorientasi kepada aspek pendidikan, antara lain; Kabupaten. Sanggau memiliki tujuan yaitu; meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sosial, dengan sasaran demi terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan tersedianya akses pendidikan, kesehatan dan sosial (Badan Pembangunan Daerah Kab. Sanggau, 2014). Hal ini diwujudkan dengan strategi mendorong percepatan pencapaian wajib belajar 9 tahun dan perintisan wajib belajar 12 tahun (Badan Pembangunan Daerah Kab. Sanggau, 2014). Adapun beberapa kebijakan lainnya dari Kabupaten Sanggau demi mewujudkan strategi tersebut dilakukan dengan bentuk kebijakan antara lain (Badan Pembangunan Daerah Kab. Sanggau, 2014) :

1. Percepatan pencapaian wajib belajar 9 tahun dan perintisan wajib belajar 12 tahun;
2. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Peningkatan pemberantasan Buta Aksara;
4. Pencegahan siswa putus sekolah dan peningkatan angka keberlanjutan siswa;
5. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat;
6. Percepatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang pendidikan;
7. Peningkatan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan;
8. Pemfasilitasian pendidikan tinggi.

EVALUASI PENCAPAIAN CAPAIAN SDGS POIN 4 DI KECAMATAN SEKAYAM

Peneliti berpendapat, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan pendekatan *statist* dalam orientasi pembangunan. Keterlibatan pemerintah yang sangat masif baik di tingkat pusat dan daerah menjadi salah satu bukti diterapkannya pendekatan tersebut. Khusus untuk poin ke-4 SDGs ini, fokus pembangunan nasional Indonesia juga mengarahkan pada konsep *human development*.

Meskipun demikian, patut juga dicatat bahwa kualitas pendidikan di Indonesia belum merata. Disparitas angka IPM, sebaran fasilitas dan guru di sekolah-sekolah, dan perhatian pemerintah atas pendidikan antar daerah masih menjadi hambatan. Pada kasus di Kecamatan Sekayam saja, kondisi sekolah yang menjadi lokasi observasi kami di Desa Bungking jelas masih memerlukan perhatian. Padahal secara lokasi, SD tersebut berada di jalur utama desa dan kecamatan. Apalagi yang berada tidak di jalur utama. Ditambah lagi kemudahan akses masyarakat ke Malaysia, baik untuk berbelanja, berdagang, atau menghadiri acara keluarga, sering membuat warga masyarakat membanding-bandingkan kondisinya di Indonesia.

Fenomena lain yang juga menarik di penghujung pemerintahan Jokowi-JK adalah isu berbau asing, mulai dari pekerja asing di daerah-daerah Indonesia dan wacana impor guru asing. Kondisi di daerah yang masih belum maksimal pembangunannya ditambah dengan ketidakmerataan dapat membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya akan aksi nyata pemerintah. Ditambah fenomena membandingkan atau bahkan bergantung dengan ekonomi Malaysia semakin memperparah kondisi tersebut. Sangat mungkin terjadi, masyarakat menyalahkan pemerintah atas realita keterbelakangan yang mereka rasakan. Mengingat dalam konteks pembangunan nasional, negara mengambil peranan yang sangat besar. Kondisi ini dapat memberikan ancaman terhadap keamanan manusia masyarakat dan lebih lanjut mengancam keamanan nasional.

Masyarakat di perbatasan atau daerah-daerah yang belum maju tidak bisa disalahkan seluruhnya jika mereka kemudian menggantungkan diri pada ekonomi negara tetangga. Karena pilihan mereka adalah bertahan hidup dengan segala daya upaya yang dapat mereka lakukan. Prinsip ini sejalan dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang mengupayakan kemampuan bertahan hidup atas kebutuhan hidup,

Pemerintahan Indonesia ke depan perlu mengambil banyak inisiatif-inisiatif baru untuk mengurangi efek buruk dari ketidakmerataan kualitas pendidikan. Mulai dari memperbaiki kordinasi lintas instansi dan semua pemangku kepentingan. Hampir di setiap penelitian yang peneliti lakukan dan berkaitan dengan program-program nasional atau daerah, selalu saja masalah kordinasi menjadi salah satu temuan yang muncul. Semua aktor yang terlibat perlu benar-benar menempatkan kepentingan masyarakat banyak di atas kepentingan kelompok atau gengsi instansi. Masalah sinkronisasi data misalnya. Hal ini sering sekali peneliti temukan jika melakukan penelusuran data atas isu-isu tertentu di daerah.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah evaluasi program pembangunan secara berkala. Kebiasaan laporan Asal Bapak Senang (ABS) harus mulai ditinggalkan. Diganti dengan laporan berbasis kinerja. Berani menyampaikan masalah yang dihadapi dan kritis serta solutif mencari penyelesaian masalah yang ditemukan. Kita dapat belajar dari Jepang di mana pejabatnya rela meminta maaf atau bahkan mundur dari jabatan saat bawahannya melakukan kesalahan. Sehingga masyarakat akan benar-benar merasakan kehadiran negara dalam pembangunan, khususnya di bidang pendidikan. Bukan pemerintah yang sekadar mencari suara saat pemilihan umum. Bukan juga pemerintah yang hampir setiap minggu ditangkap karena kasus korupsi.

Ketiga, adalah komitmen dari semua pihak terkait. Kedua upaya tambahan yang peneliti sampaikan tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa komitmen yang baik. Komitmen yang diwariskan dari rezim ke rezim, bukan rezim yang saling mengganti program rezim sebelumnya. Kesenambungan dalam menjaga dan melaksanakan komitmen menjadi penting jika Indonesia benar-benar ingin mewujudkan generasi emas 2045.

KESIMPULAN

Pencapaian SDGs sementara di bidang pendidikan pada poin keempat memang sudah cukup baik secara nasional. Didukung dengan *baseline* capaian MDGs sampai tahun 2015 yang sudah tercapai semua indikatornya. Namun, masalah pemerataan kualitas masih menjadi masalah bagi Indonesia. Fasilitas pendidikan dan sarana penunjang pendidikan belum benar-benar memadai di seluruh kawasan Indonesia, khususnya di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Pemerintah Indonesia era Jokowi-JK memang sudah menempatkan peran negara sangat besar di bidang pembangunan manusia pada sektor pendidikan. Tetapi, pembenahan masih perlu dilakukan

agar manusia Indonesia mampu merasa aman dalam hal pemenuhan kebutuhannya atas pendidikan. Khusus di kawasan perbatasan, keberadaan negara harus benar-benar mampu dirasakan jika tidak ingin manusianya berpindah secara sukarela karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi.

Saran lainnya yang dapat kami sampaikan adalah perlu dilakukan evaluasi berjenjang dalam pembangunan pendidikan. Mulai dari memastikan fasilitas pendidikan dan kualitas guru merata, termasuk dana pendidikan yang disalurkan untuk membayar gaji guru honorer dengan layak. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan dengan meneliti aspek bantuan internasional dalam pencapaian SDGs Indonesia. Kajian tersebut dapat dilakukan dengan teori diplomasi untuk melihat kemampuan Indonesia dalam merangkul mitra internasional dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, A. (2019). *Belajar di Bekas Rumah Dinas Guru*. Diakses pada Oktober 17, 2019, dari Antarafoto: <https://www.antarafoto.com/peristiwa/v1551273011/belajar-di-bekas-rumah-dinas-guru>

Alkrie, S. (2003). *A Conceptual Framework for Human Security*. Queen Elizabeth House: University of Oxford.

Badan Pembangunan Daerah Kab. Sanggau. (2014). *RPJMD Kab. Sanggau 2014-2019*. Diakses pada 15 Juli 2019, dari Badan Pembangunan Daerah Kab. Sanggau: <http://bappeda.sanggau.go.id/download/rpjmd-kabupaten-sanggau-tahun-2014-2019/>

Badan Pusat Statistik. (2019). *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Di Indonesia*. Diakses pada 6 Agustus 2019, dari Filantropi: <http://filantropi.or.id/pubs/uploads/files/3%20BPS%20Potret%20Awal%20TPB%20di%20Indonesia.pdf>

Bappeda Sanggau. (2017). *Sosialisasi Sustainable Development Goals (SDG's) Dalam Rangka Implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017*. Diakses pada 10 Juli 2019, dari Bappeda

Sanggau: <http://bappeda.sanggau.go.id/sosialisasi-sustainable-development-goals-sdgs-dalam-rangka-implementasi-peraturan-presiden-nomor-59-tahun-2017/>

BPS Kabupaten Sanggau. (2018). *Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2018*. Sanggau: BPS Kabupaten Sanggau.

BPS Kabupaten Sanggau. (2018). *Statistik Daerah Kabupaten Sanggau 2018*. Sanggau: BPS Kabupaten Sanggau.

BPS Kabupaten Sanggau. (2016). *Statistik Daerah Kecamatan Sekayam 2016*. Sanggau: BPS Kabupaten Sanggau.

BPS Provinsi DKI Jakarta. (2016). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta.

BPS Provinsi Kalimantan Barat. (2018). *Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2018*. Pontianak: BPS Kalimantan Barat.

BPS Provinsi Kalimantan Barat. (2018). *Statistik Daerah Kalimantan Barat 2018*. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat.

Emas, R. (2015). *The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles*. Diakses pada 15 Agustus 2019, dari Brief for GSDR 2015: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5839GSDR%202015_SD_concept_definition_rev.pdf

Hönke, J., & Ledere, M. (2013). Development and International Relations. In W. Carlsnaes, T. Risse, & B. A. Simmons, *Handbook of International Relations* (hlm. 775-800). London: Sage Publication Ltd.

Komnasham. (2017). *Pendidikan Sebagai Hak Asasi*. Diakses pada 7 Juli 2019, dari SDG Komnasham: <https://sdg.komnasham.go.id/sdg-content/uploads/2017/04/Tujuan-4.pdf>

Krause, K. (2007). Towards a Practical Human Security Agenda. *The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces Policy Paper No. 26*.

Ruslan, H. (2011). *Anak Indonesia “Dibajak” Malaysia*. Diakses pada 17 Oktober 2019, dari Republika: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/06/23/m61nx5-anak-indonesia-dibajak-malaysia>

UNDP Indonesia. (2016). *Illustrated Results Report 2014-2016*. Jakarta: UNDP Indonesia.

United Nations Development Programme. (1994). *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press.

United Nations. (2018, July 5). *How the concept of development has changed at the UN over time*. Diakses pada 7 Agustus 2019, dari UN Permanent Missions: <https://www.un.int/news/how-concept-development-has-changed-un-over-time>